

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya peraturan Otonomi Daerah, menjadikan Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Masing-masing kepala daerah berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerja daerahnya agar tak tertinggal dengan daerah-daerah lainnya. Seperti yang tertera pada UU No. 32 Tahun 2004 dalam , Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mendukung secara optimal terselenggaranya Otonomi daerah maka diberlakukan pula perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini diatur di dalam UU No. 33 Tahun 2004. Selain perimbangan keuangan, desentralisasi fiskal juga di atur pula di dalamnya. Desentralisasi fiskal sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. Dengan adanya desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini dapat di capai dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan salah satu hal penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melakukan otonomi daerah secara nyata dan

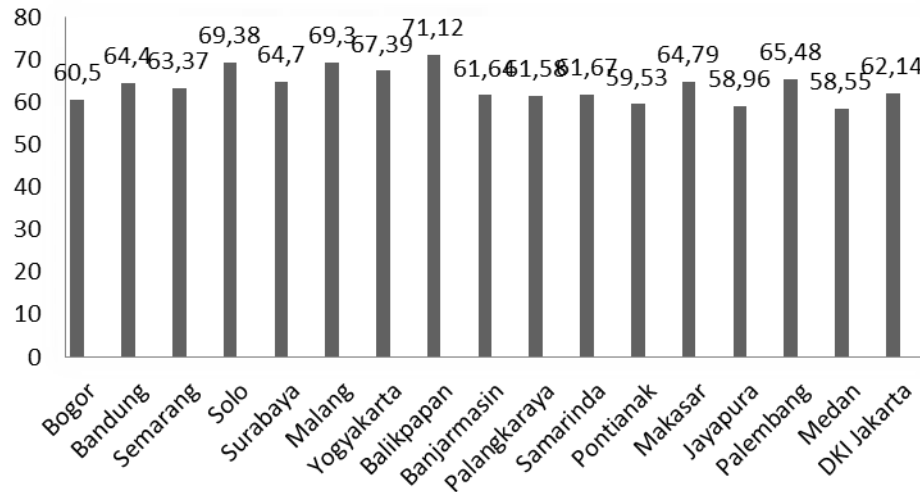
bertanggung jawab. Setiap daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah berdasarkan dengan pertimbangan bahwa yang lebih mengetahui tentang kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat adalah daerah itu sendiri. Atas dasar inilah, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sumitro (1995) dalam Rindu Datu K (2012) Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan menjadi suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merata dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata.

Secara umum, salah satu cara meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan investasi daerah. Investasi daerah sendiri dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengembangkan promosi daerah. Untuk meningkatkan sebuah investasi daerah ajang promosi daerah sangat penting untuk menarik investor berminat menanamkan

modalnya di daerah. Promosi daerah yang dapat menarik minat para investor, berisi tentang data bio fisik, data sosio ekonomi, dan data topografi suatu wilayah. Selain itu, pemerintah dapat mengembang promosi pada tiga aspek yaitu *liveability* (layak untuk dihuni), *investability* (layak untuk di investasi), dan *visitability* (layak untuk dikunjungi).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) tahun 2014, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke empat pada *Most Livable City*. Dalam peneltian ini, warga kota menepatkan faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang paling penting untuk kelayakan hunian kota bersama dengan kebersihan dan tersedianya fasilitas kesehatan.



Sumber : Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) 2014

Gambar 1.1
Persentase *Most Liveable City*

Dengan Yogyakarta menjadi salah satu kota yang layak untuk dihuni, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengunjungi Yogyakarta sebagai salah satu objek wisata. Pada kurun waktu 2010 sampai

2015 pertumbuhan jumlah wisatawan di Yogyakarta selalu mengalami kenaikan. Ini dapat dilihat dari tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wisatawan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	4.083.605	4.673.366	5.251.352	5.619.231
Sleman	3.042.232	3.612.954	4.223.958	4.950.934
Bantul	2.378.209	2.087.874	2.708.816	4.519.199
Kulon Progo	596.529	695.850	904.972	1.289.695
Gunung Kidul	1.279.065	1.822.251	3.685.137	2.642.759

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2015

Melihat dari sektor pariwisata yang selalu meningkat setiap tahunnya, para investor diperkirakan dapat tertarik untuk menanamkan modal atau investasinya di Yogyakarta. Peningkatan investasi ini bisa menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan antara *Liveability* (layak dihuni), *Investability* (layak menjadi lahan investasi), dan *Visitability* (layak dikunjungi) yang merupakan upaya strategi promosi daerah guna peningkatan Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“PENGARUH *LIVEABILITY*, *INVESTABILITY*, DAN *VISITABILITY* TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *liveability* terhadap Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh *investability* terhadap Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh *visitability* terhadap Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana strategi promosi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *liveability* terhadap Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh *investability* terhadap Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh *visitability* terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk mengetahui strategi promosi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu dan sebagai acuan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya tentang Promosi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Promosi Daerah.